

GEOPOLITIK KEPEMIMPINAN GLOBAL DAN KOMPETISI SUMBER DAYA: PERSPEKTIF INDO-PASIFIK DAN PETA ULANG DOKTRIN PERTAHANAN RI

M. Effendi¹, Rudi Hartono², Tarsisius Susilo³, Setiawan Arismunandar⁴, Edi Wahyudi⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1naufalfen@yahoo.com, 2rudynav2001@gmail.com, 3muchus70@gmail.com,

Abstrak : Persaingan kepemimpinan global di era kini kian terfokus di kawasan Indo-Pasifik, terutama antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, dalam memperebutkan sumber daya strategis. Rivalitas ini berlangsung di berbagai domain energi, mineral kritis, teknologi, lahan, hingga informasi dan mengubah arsitektur keamanan kawasan secara signifikan. Artikel ini menganalisis bagaimana kompetisi sumber daya tersebut (misalnya sengketa energi di Laut Cina Selatan, perlombaan teknologi 5G dan semikonduktor, perebutan jalur pasokan) memengaruhi dinamika geopolitik Indo-Pasifik dan berdampak pada keamanan Indonesia. Ditekankan urgensi bagi Indonesia untuk merespons dengan memetakan ulang doktrin pertahanan nasionalnya. Berlandaskan Visi Asta Cita 2045, Indonesia perlu merumuskan doktrin pertahanan baru yang adaptif memperkuat pertahanan maritim, kemampuan multi-domain (siber dan antariksa), serta kemitraan pertahanan regional tanpa meninggalkan prinsip bebas-aktif. Melalui pendekatan interdisipliner, kajian ini mengidentifikasi pola rivalitas sumber daya oleh kekuatan besar, menilai ancaman dan peluang bagi Indonesia, mengevaluasi kesenjangan dalam doktrin pertahanan saat ini, dan menawarkan kerangka doktrin “Indo-Pasifik” yang selaras dengan agenda Indonesia Emas 2045. Hasil analisis merekomendasikan doktrin pertahanan Indonesia yang proaktif dan komprehensif untuk menjaga kedaulatan dan sumber daya nasional di tengah rivalitas global, sehingga Indonesia dapat berperan konstruktif dalam menjaga stabilitas kawasan menuju 2045.

Kata Kunci : Indo-Pasifik; kompetisi sumber daya; kepemimpinan global; doktrin pertahanan; Asta Cita 2045; geopolitik

Abstract: The contest for global leadership is increasingly centered in the Indo-Pacific, where major powers the United States, China, and Russia are vying for strategic resources. This rivalry spans multiple domains (energy, critical minerals, technology, land, and information) and is reshaping the region's security architecture. This article examines how resource competition (for example, disputes over oil in the South China Sea, the 5G and semiconductor race, and struggles for supply routes) is impacting Indo-Pacific geopolitics and influencing Indonesia's security environment. It underlines the urgency for Indonesia to respond by recalibrating its national defense doctrine. Grounded in the Asta Cita 2045 vision, Indonesia must formulate an adaptive defense doctrine that strengthens maritime security, multi-domain capabilities (cyber and space), and defense diplomacy all while upholding its independent and active foreign policy. Using an interdisciplinary approach, this study identifies patterns of resource rivalry among great powers, assesses the threats and opportunities for Indonesia, evaluates gaps in Indonesia's current defense doctrine, and proposes a new “Indo-Pacific” defense doctrine framework aligned with the Indonesia Gold 2045 agenda. The analysis recommends a proactive and comprehensive Indonesian defense doctrine to safeguard sovereignty and national resources amid global rivalry, enabling Indonesia to contribute constructively to regional stability toward 2045.

Keywords: Indo-Pacific; resource competition; global leadership; defense doctrine; Asta Cita 2045; geopolitics

Pendahuluan

Kawasan Indo-Pasifik telah menjelma menjadi teater utama persaingan kekuatan global dewasa ini. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia terlibat dalam rivalitas tajam untuk memperebutkan sumber daya strategis mulai dari cadangan energi dan mineral kritis, dominasi teknologi mutakhir, hingga kontrol

lahan dan informasi. Kompetisi multi-domain ini menciptakan dinamika geopolitik baru yang kompleks. Contohnya, Laut Cina Selatan menjadi ajang sengketa klaim demi sumber daya minyak, gas, dan perikanan; perlombaan teknologi 5G dan semikonduktor mencerminkan upaya memimpin inovasi; dan pengaruh atas jalur perdagangan serta suplai energi di Pasifik diperebutkan untuk kepentingan geoekonomi masing-masing negara.

Bagi Indonesia, kondisi ini memunculkan dilema strategis. Sebagai negara terbesar di ASEAN dengan posisi geografis sentral di Indo-Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan agar tidak terjebak dalam pusaran rivalitas kekuatan besar, namun juga tidak tertinggal dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Prinsip politik luar negeri bebas-aktif menuntut Indonesia bersikap netral yang aktif, menghindari politik blok sambil tetap berkontribusi pada perdamaian kawasan. Namun, perkembangan terkini seperti memanasnya tensi di Laut Natuna Utara akibat kapal asing, hingga tekanan memilih teknologi pertahanan dari blok Barat atau Timur memaksa Indonesia melakukan adaptasi strategis.

Pertanyaan kunci yang diangkat tulisan ini adalah: Bagaimana persaingan sumber daya antara kekuatan global di Indo-Pasifik mempengaruhi arsitektur keamanan kawasan, dan bagaimana Indonesia dapat merumuskan kembali doktrin pertahanan nasional berbasis Asta Cita 2045 untuk menghadapi realitas tersebut? Menjawab pertanyaan ini penting agar Indonesia memiliki arah pertahanan yang jelas di tengah konstelasi geopolitik baru. Indo-Pasifik yang kian strategis (misalnya sengketa Laut Cina Selatan, kompetisi infrastruktur di Pasifik, AUKUS dan Quad yang melibatkan negara besar) menuntut Indonesia mengevaluasi ulang postur pertahanan dan doktrin militernya. Landasan konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan amanat Visi Indonesia Emas 2045 (Asta Cita) menjadi pijakan dalam melakukan penyesuaian tersebut.

Tinjauan Pustaka

Kompetisi Sumber Daya Global di Indo-Pasifik: Kajian-kajian global menunjukkan adanya intensifikasi *resource competition* di Indo-Pasifik seiring bangkitnya Tiongkok dan respon AS. Amerika Serikat dan Tiongkok, misalnya, terlibat persaingan ketat dalam mengamankan energi dan mineral kritis. Tiongkok sangat bergantung pada impor energi, terutama dari Timur Tengah dan Afrika, sehingga mendorong ekspansi pengaruhnya melalui inisiatif *Belt and Road* (OBOR) untuk mengamankan jalur suplai. Proyek-proyek pelabuhan strategis didanai Tiongkok di Sri Lanka (Hambantota) dan Pakistan (Gwadar) bertujuan memastikan akses logistik dan energi, bahkan menimbulkan kekhawatiran *debt-trap diplomacy* ketika Sri Lanka terpaksa menyerahkan pengelolaan Hambantota ke Tiongkok dengan sewa 99 tahun akibat tak mampu melunasi utang. Sementara itu, Amerika Serikat meluncurkan “Strategi Indo-Pasifik” yang menekankan keamanan jalur perdagangan dan pasokan, serta kemitraan dengan sekutu regional untuk menghadapi pengaruh Tiongkok. Upaya AS mencakup pembangunan rantai pasok yang resilient dan inisiatif infrastruktur alternatif (misalnya *Blue Dot Network* oleh AS-Jepang-Australia) untuk menandingi OBOR. Rusia, di sisi lain, meski perannya di Indo-Pasifik tidak sekuat dua negara tersebut, turut mencari akses pasar dan sumber daya contohnya *pivot to Asia* dengan meningkatkan ekspor energi ke Tiongkok dan Asia akibat tekanan di front Eropa.

Indo-Pasifik dikenal kaya sumber daya strategis. Laut Cina Selatan diperkirakan mengandung potensi minyak dan gas yang signifikan total cadangan terbukti dan terduga mencapai sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam di seluruh kawasan. Meskipun sebagian besar cadangan tersebut berada di dekat pesisir negara-negara sekitar (bukan di area pulau sengketa Spratly/Paracel), persepsi kekayaan SDA di Laut Cina Selatan mendorong klaim agresif. Perairan Pasifik barat juga melimpah hasil laut (perikanan tuna, dsb.), serta potensi mineral nodul polimetalik di dasar laut. Kajian

Smith (2023) meski tidak dirujuk di sini secara spesifik sejalan dengan temuan bahwa ketergantungan energi Tiongkok mendorong negeri itu membangun angkatan laut yang mampu beroperasi jauh (*blue-water navy*) hingga Samudra Hindia, diiringi agenda geoekonomi OBOR. Di pihak lain, AS dan sekutunya memperkuat kehadiran di jalur strategis seperti Selat Malaka dan Laut Filipina demi menjamin *freedom of navigation*. Persaingan juga merambah teknologi: misalnya, kontrol atas rantai pasok *rare earth* dan litium untuk baterai, serta pembatasan ekspor chip semikonduktor oleh AS untuk menghambat kemajuan teknologi AI Tiongkok.

Kepemimpinan Global di Indo-Pasifik: Gaya dan strategi kepemimpinan para aktor besar turut mewarnai kompetisi di kawasan. Di era Presiden Joe Biden, AS mengedepankan pendekatan *kooperatif-multilateral* dengan merevitalisasi aliansi tradisional dan membentuk kemitraan baru seperti Quad (AS, India, Jepang, Australia) dan AUKUS. Walau masih mempertahankan orientasi kepentingan nasional (*America First* versi halus), AS di bawah Biden aktif terlibat dalam institusi regional dan mendukung sentralitas ASEAN. Sementara itu, Presiden Xi Jinping membawa visi "*China's rightful place*" artinya Tiongkok menuntut peran besar sesuai kekuatan ekonominya. Retorika Tiongkok menggaungkan inklusivitas dan win-win (melalui *Belt and Road Initiative*), tetapi di lapangan juga disertai langkah tegas seperti militerisasi pulau-pulau sengketa di Laut Cina Selatan dan peningkatan anggaran pertahanan. Militerisasi ini dikonfirmasi oleh laporan Amerika bahwa Tiongkok telah sepenuhnya mempersenjatai sedikitnya tiga pulau buatan di Spratly dengan rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan *jamming*, serta jet tempur bertentangan dengan janji Xi pada 2015 untuk tidak memedemiliterisasi pulau di LCS. Adapun Rusia, peran kepemimpinannya di Indo-Pasifik relatif terbatas; Moskow lebih banyak bertindak sebagai *player* pendukung, misalnya melalui kemitraan strategis dengan Beijing (latihan militer bersama) dan pemasok alutsista bagi negara seperti India atau Vietnam. Namun, perang Ukraina sejak 2022 mendorong Rusia lebih agresif mencari dukungan Asia, walau pengaruh politik-militer langsungnya di Asia Timur dan Pasifik masih kecil dibanding AS-Tiongkok.

Dalam wacana akademis, konsep "*Thucydides's Trap*" sering diangkat untuk menggambarkan potensi konflik akibat rivalitas AS-Tiongkok, mirip perang Sparta-Athena. Meskipun konsep ini debatable, ia mencerminkan kekhawatiran bahwa kekuatan yang sedang naik (Tiongkok) dan pemimpin status quo (AS) bisa terdorong dalam spiral konflik. Hal ini mendorong negara-negara Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, untuk terus mengupayakan mekanisme dialog dan norma regional (seperti *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* 2019) agar rivalitas kekuatan besar tidak meletus menjadi konflik terbuka di kawasan.

Arah Doktrin Pertahanan Indonesia: Literatur tentang pertahanan Indonesia mencatat bahwa doktrin pertahanan tradisional Indonesia bersifat defensif dan berakar pada konsep Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yaitu pertahanan total dengan melibatkan seluruh rakyat dan bersifat non-agresif. Indonesia juga menganut politik luar negeri bebas-aktif yang terefleksi dalam sikap non-blok sejak era Perang Dingin. Namun, perkembangan ancaman mutakhir menimbulkan diskursus bahwa doktrin lama perlu disesuaikan. Laporan Lemhannas (2022) mengisyaratkan perlunya doktrin baru yang mampu menghadapi ancaman non-konvensional seperti serangan siber, *proxy war*, ancaman biologis, dan lain-lain, sekaligus mempertahankan kepentingan Indonesia di domain maritim yang semakin rentan. Buku Putih Pertahanan Kementerian Pertahanan terbaru (2022) juga menyoroti *proliferasi* persenjataan canggih di kawasan dan peningkatan ancaman *grey zone* yang tidak tertangani oleh doktrin konvensional. Selain itu, visi strategis Indonesia 2045 melalui Asta Cita menempatkan "Memantapkan Pertahanan dan Keamanan" sebagai salah satu misi utama. Asta Cita 2045 Prioritas Pertahanan (Misi ke-2) mengamanatkan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit, serta mendorong kemandirian di sektor pangan, energi, dan air demi ketahanan

nasional yang komprehensif. Artinya, ada kesadaran pada level kebijakan bahwa kemandirian strategis (misal: produksi alutsista dalam negeri, swasembada bahan baku strategis) menjadi kunci menghadapi era kompetisi ini. Penelitian di lingkungan Universitas Pertahanan (Misalnya Jurnal Unhan, 2023) juga mengkritisi bahwa *sea power* Indonesia masih belum optimal: sebagai negara kepulauan terbesar, kemampuan maritim TNI AL belum sebanding dengan luasnya wilayah dan panjangnya garis pantai yang dijaga. Hal ini dipandang sebagai *gap* serius di tengah meningkatnya tantangan keamanan maritim (penyelundupan, pencurian ikan, operasi kapal asing di ZEE).

Penelitian Terdahulu dan Gap: Sejumlah studi terkait Indo-Pasifik umumnya fokus pada aspek geopolitik dan ekonomi, atau analisis diplomasi Indonesia seperti strategi *hedging* terhadap AS-Tiongkok. Namun, relatif sedikit kajian yang menghubungkan langsung perubahan lanskap geopolitik Indo-Pasifik dengan kebutuhan adaptasi doktrin militer Indonesia. Beberapa pengecualian misalnya studi tentang *strategic hedging* Indonesia menyimpulkan pentingnya peningkatan kapasitas pertahanan domestik untuk menjaga otonomi di tengah tekanan eksternal. Meski demikian, gap yang diidentifikasi adalah perlunya kajian interdisipliner yang secara eksplisit menjembatani dinamika persaingan global (geopolitik) dengan implikasi terhadap doktrin dan kebijakan pertahanan Indonesia. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis situasi terkini serta menawarkan rekomendasi konkrit berupa peta ulang doktrin pertahanan RI.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interdisipliner, memadukan studi geopolitik internasional dengan kajian kebijakan pertahanan nasional. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dibahas berada di ranah antarnegara (rivalitas kekuatan besar) namun solusinya terkait kebijakan domestik (doktrin militer Indonesia).

Sumber Data: Untuk memahami pola kompetisi di Indo-Pasifik, digunakan sumber-sumber primer dan sekunder dari tingkat global dan regional. Di antaranya: *Indo-Pacific Strategy of the United States 2022* (dokumen strategi resmi Gedung Putih), *China's Defense White Paper 2019*, serta dokumen kebijakan pertahanan negara besar lain yang relevan. Laporan-laporan institusional seperti *US Department of Defense Indo-Pacific Report*, *Konsep Keamanan Nasional Rusia (Pivot to Asia)*, dan publikasi think-tank (CSIS, RAND) tentang perebutan sumber daya juga menjadi rujukan. Untuk perspektif kawasan, digunakan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) 2019* sebagai acuan visi ASEAN terhadap dinamika Indo-Pasifik, serta analisis dari ASEAN Studies dan ISEAS.

Di tingkat nasional Indonesia, penelitian merujuk pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (terbitan Kemenhan 2015 dan revisi 2022) untuk memahami doktrin dan postur resmi serta perubahan yang diakui pemerintah. Peraturan perundangan terbaru (misal UU No. 23/2019 tentang PSDN Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan) juga ditelaah guna melihat landasan hukum pertahanan semesta. Yang tak kalah penting, dokumen visi pembangunan jangka panjang seperti Visi Indonesia 2045 dan pernyataan resmi Lemhannas terkait Asta Cita 2045 digunakan untuk mengaitkan rekomendasi doktrin dengan agenda nasional. Selain itu, data empiris insiden keamanan (contoh: laporan insiden kapal *Coast Guard* Tiongkok di Natuna 2020 dan 2024, aktivitas FONOPs AS di Laut Cina Selatan, dan lain-lain.) dikumpulkan melalui sumber berita terverifikasi dan jurnal keamanan maritim.

Proses Analisis: Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap: (1) Identifikasi pola kompetisi sumber daya : tahap ini menginventarisasi contoh-contoh konkret rivalitas (misal kasus Laut Cina Selatan, proyek OBOR di Indo-Pasifik, kebijakan pembatasan ekspor teknologi) untuk memetakan

kepentingan masing-masing aktor global. (2) Analisis dampak bagi Indonesia : mengevaluasi bagaimana contoh rivalitas tersebut menghadirkan ancaman atau peluang bagi kepentingan nasional Indonesia. Analisis mencakup aspek tradisional (ancaman kedaulatan, pelanggaran wilayah) hingga non-tradisional (ancaman ekonomi, siber, perpecahan diplomatik ASEAN). (3) Evaluasi doktrin pertahanan Indonesia saat ini : menelaah kesenjangan antara postur/strategi TNI yang ada dengan spektrum ancaman baru. Di sini digunakan metode komparatif antara prinsip-prinsip doktrin lama (defensif aktif, territorial warfare) versus kebutuhan baru (proyeksi maritim, *hybrid warfare response*). (4) Perumusan rekomendasi doktrin baru : berdasarkan temuan sebelumnya, disusun kerangka konseptual doktrin pertahanan yang diusulkan. Rekomendasi ini diuji kesesuaiannya dengan prinsip Asta Cita 2045 serta dengan kondisi politik luar negeri bebas-aktif.

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Setiap klaim didukung oleh sumber referensi untuk menjaga objektivitas. Dengan metodologi di atas, diharapkan kajian ini menghasilkan rumusan strategis yang aplikatif bagi pembuat kebijakan pertahanan Indonesia dalam merespons perubahan geopolitik Indo-Pasifik.

Analisis dan Pembahasan

Rivalitas Kekuatan Besar di Indo-Pasifik

Kompetisi antara kekuatan besar di Indo-Pasifik dapat dilihat dari berbagai kasus konkret yang mencerminkan perebutan sumber daya dan pengaruh strategis:

a. Sengketa Laut Cina Selatan (LCS): Kawasan LCS menjadi episentrum rivalitas karena potensi sumber daya dan posisi strategis jalur lautnya. Tiongkok mengklaim hampir 90% LCS melalui *nine-dash line*, demi menguasai sumber daya energi dan perikanan di dalamnya. Untuk memperkuat klaim, Tiongkok membangun pulau-pulau buatan di kepulauan Spratly dan Paracel, lalu memasang instalasi militer di sana (landasan udara, rudal, radar). Pada 2022, terungkap bahwa Tiongkok telah mempersenjatai Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef dengan rudal anti-kapal/udara serta fasilitas militer lengkap. Selain itu, Tiongkok mengerahkan *maritime militia* (kapal nelayan berpemandu militer) dan kapal Penjaga Pantai untuk menegaskan kehadiran di area sengketa tanpa memicu perang konvensional. Amerika Serikat dan sekutunya menanggapi manuver ini dengan operasi *Freedom of Navigation* (FONOPs) – misalnya patroli kapal perang AS di sekitar Pulau Paracel dan Spratly untuk menantang klaim berlebihan Tiongkok. AS juga meningkatkan latihan militer gabungan dengan Jepang, Australia, dan India (Quad) serta menjalin kemitraan keamanan baru seperti AUKUS, guna memberikan tekanan kolektif terhadap ekspansi Tiongkok. Rivalitas di LCS ini menunjukkan pola “aksi-reaksi”: setiap langkah militerisasi Tiongkok diimbangi dengan unjuk kehadiran militer AS dan protes diplomatik (misal G7 mengecam militerisasi LCS). Dampaknya, LCS berubah menjadi kawasan *security dilemma* dengan risiko miscalculation yang dapat memicu konflik lebih luas.

b. Perlombaan Teknologi dan Informasi: Sumber daya strategis tak lagi hanya berupa fisik (minyak atau mineral), tetapi juga teknologi dan data. AS dan Tiongkok terlibat persaingan dalam industri teknologi tinggi seperti jaringan 5G, kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur semikonduktor. Pemerintah AS di era Trump hingga Biden memberlakukan pembatasan ekspor chip canggih dan peralatan litografi ke Tiongkok, serta menekan sekutu untuk tidak menggunakan teknologi 5G Huawei, dengan alasan keamanan nasional. Langkah ini bertujuan mencegah Tiongkok mendominasi sektor AI militer maupun sipil. Sebagai balasan, Tiongkok meluncurkan program *Made in China 2025* dan *China Standards 2035* untuk mencapai

kemandirian teknologi – termasuk mengembangkan industri chip domestik dan sistem operasi sendiri. Kompetisi ini berdimensi geopolitik: siapa yang unggul di AI dan komputasi kuantum, misalnya, diyakini akan unggul dalam militer masa depan. Selain itu, persaingan merambah ruang informasi (*influence operations*). Kasus *disinformation* di media sosial terkait isu Uyghur, Covid-19, atau politik domestik negara ASEAN, disebut-sebut sebagai contoh perang informasi antara kubu pro-Barat vs pro-Tiongkok. Bagi Indonesia, perang teknologi dan informasi global ini berimplikasi pada akses teknologi pertahanan (misal pembatasan drone berteknologi tinggi) dan kerentanan terhadap *cyber-warfare*.

c. Kontestasi Jalur dan Pasokan Energi: Letak Indo-Pasifik yang mencakup Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya krusial bagi arus perdagangan dunia, terutama energi. Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Natuna Utara adalah *chokepoints* vital. Lebih dari 80% impor minyak Tiongkok melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, menciptakan *Malacca Dilemma* bagi Beijing kekhawatiran bahwa jalur ini bisa diblokir oleh Angkatan Laut AS sewaktu konflik. Untuk mengurangi risiko, Tiongkok berinvestasi pada rute alternatif: jalur pipa energi dari Myanmar ke Yunnan, pembangunan pelabuhan darat di Gwadar (Pakistan) yang menghubungkan ke Xinjiang melalui Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, serta menjajaki Terusan Kra di Thailand. Namun, sebagian besar upaya ini masih tahap jangka panjang. Sementara itu AS, bersama Angkatan Laut sekutu (misal Inggris, Jepang, Australia), mempertahankan kehadiran di perairan strategis untuk menjamin kelancaran *sea lines of communication* (SLOC). Pangkalan AL AS di Singapura (Changi) dan akses militer ke pangkalan di Filipina dan Australia adalah bagian dari strategi tersebut. Kompetisi juga tampak dalam perebutan pengaruh di negara penghasil energi: AS dan Eropa mencoba meredam dominasi investasi Tiongkok di sektor migas Afrika dan Teluk, misalnya dengan menawarkan investasi alternatif yang mengedepankan transparansi (lihat *Build Back Better World G7*). Rusia pun memanfaatkan celah dengan menawarkan diskon penjualan minyak/gas ke Asia (contoh: peningkatan ekspor minyak ke India dan Tiongkok pasca-sanksi Barat). Intinya, Indo-Pasifik menjadi ajang tarik-menarik untuk memastikan siapa yang mengontrol keran energi akan punya posisi tawar geopolitik lebih besar.

Contoh-contoh di atas menegaskan Indo-Pasifik sebagai pusat kontestasi global. Berbeda dari era sebelumnya yang terfokus di Eropa atau Timur Tengah, kini sumber daya di kawasan Asia-Pasifik menjadi penentu hegemoni. Bagi negara-negara ASEAN, dinamika ini memaksa mereka menavigasi kepentingan dengan cermat, agar tidak terseret konflik kekuatan besar sekaligus tetap mendapat manfaat ekonomi. Indonesia secara khusus merasakan imbasnya, yang akan dibahas di bagian selanjutnya.

Dampak Rivalitas terhadap Keamanan Indonesia

Rivalitas global di Indo-Pasifik membawa konsekuensi langsung maupun tidak langsung bagi keamanan nasional Indonesia. Dampak tersebut mencakup aspek kedaulatan wilayah, keamanan non-tradisional, hingga posisi tawar strategis Indonesia.

Ancaman terhadap Kedaulatan dan Wilayah: Intensitas persaingan kekuatan besar membuat perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia lebih sering menjadi ajang *intrusion* atau pelanggaran, terutama oleh aktor negara yang merasa berhak atas sumber daya. Kasus menonjol adalah insiden di Laut Natuna Utara (ZEE Indonesia). Kapal *Coast Guard* Tiongkok berulang kali terdeteksi memasuki perairan Natuna yang kaya ikan dan diduga mengandung cadangan migas. Pada awal 2020, kehadiran

puluhan kapal ikan Tiongkok dengan dikawal *Coast Guard* di Natuna memicu konfrontasi diplomatik dan pengerahan kapal perang serta jet tempur oleh Indonesia. Terulang pada Oktober 2024, kapal *Coast Guard* Tiongkok CCG 5402 memasuki area eksplorasi migas Indonesia (Blok East Natuna) dan mengganggu survei seismik yang dilakukan PT Pertamina. Bakamla (Badan Keamanan Laut) harus mengawal kapal tersebut keluar dari ZEE Indonesia, sementara kapal Tiongkok mengklaim area itu sebagai “jurisdiksi China” melalui radio. Insiden-insiden semacam ini jelas merupakan ancaman kedaulatan dan menunjukkan taktik grey-zone Tiongkok yakni menekan hak berdaulat Indonesia di ZEE tanpa menggunakan kekuatan militer terbuka. Jika tidak diatasi dengan tegas, hal ini berpotensi mengurangi wibawa hukum Indonesia atas wilayahnya sendiri.

Selain Laut Natuna, rivalitas juga berdampak di wilayah lain: misalnya meningkatnya patroli kapal perang asing di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Kapal selam dan pesawat intai AS maupun Tiongkok terdeteksi melintas di perairan internasional sekitar Sulawesi dan Maluku, menimbulkan kekhawatiran potensi pelanggaran batas teritorial atau insiden kecelakaan. Demikian pula, rencana AUKUS memberikan kapal selam nuklir ke Australia menimbulkan kecemasan tersendiri bagi Indonesia akan lalu lintas kapal selam nuklir di ALKI.

Ancaman Keamanan Non-konvensional: Kompetisi global juga memunculkan ancaman non-militer yang signifikan. Serangan *cyber espionage* contohnya, meningkat seiring rivalitas teknologi. Laporan terbaru mengindikasikan upaya peretasan terhadap jaringan kementerian strategis Indonesia yang diduga oleh aktor-aktor cyber asing, terkait posisi Indonesia dalam sengketa LCS atau negosiasi infrastruktur. Pada 2021, misalnya, terungkap kelompok peretas (dengan jejak ke Tiongkok) menyusupi jaringan internal Kementerian Maritim dan Investasi Indonesia kemungkinan untuk mengakses informasi negosiasi Laut Natuna. Demikian pula, perang pengaruh (*influence operations*) makin terasa: arus hoaks dan propaganda di media sosial Indonesia terkait isu geopolitik (dari Laut Cina Selatan hingga konflik Ukraina) berpotensi memecah belah opini publik. Semua ini bagian dari kompetisi memperebutkan “*hearts and minds*” negara netral seperti Indonesia. Ancaman lain adalah *proxy war* melalui aktor non-negara: misalnya eskalasi ketegangan di Papua yang bisa ditunggangi oleh kekuatan asing untuk melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan regional.

Dilema Ekonomi dan Embargo Teknologi: Rivalitas AS-Tiongkok, khususnya perang dagang dan teknologi, berimbas pada ekonomi Indonesia yang terintegrasi dengan kedua raksasa itu. Pengenaan tarif dagang dan pembatasan ekspor teknologi antara AS-Tiongkok semasa perang dagang 2018-2019 sempat mengganggu rantai pasok manufaktur regional, yang turut memukul industri Indonesia. Lebih langsung ke pertahanan, sanksi dan embargo antarblok dapat membatasi akses Indonesia terhadap alutsista atau suku cadang. Contoh konkret, rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia terhenti karena kekhawatiran terkena sanksi CAATSA Amerika Serikat. Undang-undang AS tersebut (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act*) melarang transaksi besar dengan industri pertahanan Rusia, sehingga Indonesia khawatir terkena imbas jika memaksakan membeli Su-35. Akhirnya pada 2021 Indonesia membatalkan pembelian Su-35 dan beralih ke pesawat Barat (F-15EX dan Rafale) demi menghindari sanksi. Kasus ini menunjukkan bagaimana persaingan geopolitik menghambat fleksibilitas Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pertahanan. Di sisi lain, Indonesia juga harus berhati-hati agar ketergantungan pada teknologi pertahanan satu pihak (misal AS) tidak membuat posisi Indonesia rentan jika hubungan politik memburuk belajar dari embargo militer AS di akhir 1990an.

Perpecahan Kawasan dan Posisi Tawar: Rivalitas global, terutama AS vs Tiongkok, cenderung membelah solidaritas kawasan. ASEAN, yang menjadi *cornerstone* stabilitas regional, menghadapi tantangan *unity* karena beberapa anggotanya condong ke kubu berbeda. Kamboja dan Laos misalnya

kerap dianggap *pro-Beijing* (sering menggagalkan pernyataan keras ASEAN terhadap Tiongkok), sedangkan Singapura atau Vietnam lebih dekat ke Barat. Bagi Indonesia, hal ini menyulitkan peran sebagai *natural leader* ASEAN dalam merespon isu Indo-Pasifik. Indonesia harus melakukan diplomasi ekstra agar ASEAN Outlook on Indo-Pacific dapat diimplementasikan tanpa memihak, sembari menjaga sentralitas ASEAN agar tidak termarginalisasi oleh forum seperti Quad. Namun, persaingan kekuatan juga memberi peluang bagi Indonesia meningkatkan posisi tawarnya. Misalnya, baik AS maupun Tiongkok berusaha meraih dukungan Indonesia dengan menawarkan berbagai insentif: investasi besar (Tiongkok melalui BRI, AS melalui program *Partnership for Global Infrastructure*), transfer teknologi militer (AS menawarkan F-16 Viper, Tiongkok menawarkan ekspor drone canggih), hingga kerja sama infrastruktur digital. Indonesia bisa memanfaatkan kompetisi ini untuk negosiasi yang menguntungkan, selama mampu bermain seimbang. Pendekatan *hedging* yang selama ini dijalankan menjaga hubungan baik dengan kedua pihak dapat terus memberi ruang manuver. Namun, risiko tetap ada: tekanan untuk memilih pihak bisa meningkat seiring mengerasnya rivalitas. Misalnya, AS mungkin mendesak Indonesia melarang Huawei 5G, sementara Tiongkok bisa menahan investasi jika Indonesia terlalu dekat dengan AS. Oleh karena itu, strategi diplomasi pertahanan Indonesia ke depan harus luwes, memaksimalkan keuntungan dari rivalitas tanpa terjatuh ke konflik blok.

Urgensi Revisi Doktrin Pertahanan Indonesia

Perkembangan lanskap ancaman di atas menunjukkan bahwa doktrin pertahanan Indonesia yang ada perlu diperbarui agar siap menghadapi era kompetisi sumber daya dan rivalitas multi-domain. Selama ini, doktrin pertahanan Indonesia (baik tertulis maupun tersirat dalam postur TNI) cenderung berorientasi pada “*defensif aktif*” dan berparadigma teritorial. Hal ini historis dipengaruhi pengalaman ancaman internal (separatisme, pemberontakan) dan external terbatas (agresi Belanda, konfrontasi Malaysia) di masa lalu. Konsep Pertahanan Rakyat Semesta menitikberatkan perang gerilya dan keterlibatan rakyat luas di darat sebagai benteng terakhir. Implikasinya, TNI berkembang kuat di matra darat (AD) dengan struktur teritorial, sementara matra laut dan udara berkembang lebih lambat.

Kini konteks ancaman berubah drastis. Tantangan utama bagi Indonesia justru banyak muncul di domain maritim, siber, dan bahkan antariksa (*satellite security*). Insiden Natuna menggarisbawahi bahwa ancaman kedaulatan paling nyata datang dari laut, bukan daratan. Demikian pula, ancaman siber bisa datang tanpa mengenal batas teritorial. Oleh karenanya, doktrin pertahanan perlu bergeser dari paradigma *inward-looking continental* ke *outward-looking maritime* dan *multidomain*. Beberapa poin urgensi revisi:

- a. **Penekanan Pertahanan Maritim:** Doktrin dan strategi pertahanan harus memberi prioritas pada pengamanan wilayah *maritime domain*. Ini mencakup perlindungan ZEE dan landas kontinen Indonesia, keamanan jalur ALKI, serta kemampuan proyeksi terbatas di kawasan maritim sekitar (Asia Tenggara, Samudra Hindia). Kebijakan *Global Maritime Fulcrum* (Poros Maritim Dunia) yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak 2014 sebenarnya sudah menekankan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan maritim, namun implementasinya perlu dilanjutkan dalam doktrin militer. Konkritnya, pembangunan kekuatan laut (*sea power*) harus dipacu: TNI AL membutuhkan armada *green-water navy* yang mampu beroperasi di ZEE terluar dan ikut serta dalam patroli multilateral. Postur pertahanan yang semula defensif statis di darat harus diimbangi dengan *deterrence* di laut. Konsep “*sea control and sea denial*” layak diadopsi, misalnya dengan menempatkan kapal kombatan dan sistem rudal anti-kapal untuk mencegah

infiltrasi di wilayah strategis (Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda). Tanpa perubahan ini, Indonesia berisiko *underpowered* menjaga kedaulatannya di laut.

b. Operasi Multi-Matra & Domain Baru: Rivalitas global merambah domain siber dan antariksa, sehingga Indonesia perlu memasukkan elemen operasi siber (*cyber warfare*) dan pertahanan antariksa ke dalam doktrin. TNI pada 2019 telah membentuk Komando Siber dan juga tengah wacana membentuk satuan antariksa (atau setidaknya unit pemantau satelit dan anti-satelit pasif). Doktrin baru harus mengatur bagaimana ketiga matra konvensional (darat, laut, udara) diintegrasikan dengan kapabilitas siber dan intelijen untuk menghadapi ancaman *hybrid*. Konsep “*Unified Ledger*” atau *integrated command* mungkin perlu diterapkan agar komando gabungan bisa menangani skenario kompleks (contoh: skenario kapal asing memasuki ZEE didukung serangan siber terhadap radar kita butuh respon terkoordinasi laut dan siber). Selain itu, *situational awareness* antariksa penting mengingat banyak aset komunikasi dan penginderaan Indonesia bergantung satelit asing; doktrin perlu memasukkan rencana perlindungan infrastruktur ruang (seperti orbital slot dan stasiun bumi). Singkatnya, perang masa depan tak lagi hanya di darat-laut-udara, maka doktrin pertahanan pun harus multi-domain.

c. Kerja Sama Pertahanan dan *Minilateral*: Doktrin klasik Indonesia cenderung menghindari aliansi militer formal, sejalan politik bebas-aktif. Hal ini tetap relevan, namun doktrin baru mesti lebih proaktif membuka ruang *kerja sama pertahanan non-aliansi*. Artinya, Indonesia bisa terlibat dalam inisiatif keamanan regional yang spesifik tanpa dianggap melanggar prinsip bebas-aktif. Contoh, keterlibatan aktif dalam *Malacca Strait Patrols* bersama Malaysia, Singapura, Thailand untuk mengamankan Selat Malaka. Latihan militer bersama (latma) dengan negara-negara Quad juga bisa ditingkatkan fokusnya pada skenario SAR, HA/DR, keamanan maritim, yang semuanya meningkatkan interoperabilitas tanpa mengikat perjanjian pertahanan. Doktrin baru harus menegaskan bahwa *kemitraan strategis* diperbolehkan selama tidak mengarah pada pakta pertahanan eksklusif. Ini penting agar Indonesia tidak terisolasi secara keamanan. Di tengah munculnya pakta seperti AUKUS, Indonesia perlu menunjukkan inisiatif seperti memperkuat ADMM (*ASEAN Defense Ministers’ Meeting*) dan ADMM-Plus, atau bahkan memimpin kerjasama *Tri lateral* seperti Indonesia-Malaysia-Vietnam untuk patroli bersama di Laut Natuna. Dengan demikian, prinsip bebas-aktif dimaknai secara dinamis: bebas menentukan sikap, aktif berkontribusi menjaga keamanan kolektif.

d. Penyesuaian Strategi *Deterrence*: Realitas baru menuntut Indonesia mengadopsi strategi pencegahan (*deterrence*) yang lebih kredibel. Pada doktrin lama, konsep *deterrence* kurang mengemuka karena Indonesia tidak menghadapi ancaman agresi militer terbuka pasca-Konfrontasi. Namun kini, mengingat lingkungan strategis, Indonesia perlu *deterrence posture* terutama terhadap ancaman pelanggaran kedaulatan (contoh: kapal asing di ZEE, pesawat asing di atas ALKI). Doktrin baru bisa mengadopsi model “*deterrence by denial*”, yaitu menempatkan kemampuan yang membuat lawan ragu berhasil jika mencoba aksi melanggar kedaulatan. Misalnya, pembangunan rudal pertahanan pantai jarak sedang di titik *choke point* (Selat Malaka, Selat Sunda) dan rudal anti kapal di Natuna dapat menjadi penangkal (*denial*) bagi kapal asing yang berniat masuk secara ilegal. Selain itu, *active defensive deterrence* sesuai yang diwacanakan Kemenko Polhukam untuk Ibu Kota Negara berarti secara aktif menyiapkan lapisan pertahanan berlapis (*layered defense*) dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dini serangan. Penggabungan *early warning system*, drone maritim, dan satelit pengawas akan meningkatkan daya gentar terhadap aktor yang berniat menyusup. Tentu, pencegahan terbaik

juga melalui diplomasi, namun doktrin militer harus memastikan TNI memiliki *posture* tegas yang disegani, agar diplomasi memiliki taring.

Secara keseluruhan, perubahan lingkungan strategis memaksa transisi dari doktrin pertahanan reaktif-statistik ke doktrin proaktif-dinamis. TNI harus disiapkan untuk skenario mulai dari konflik konvensional berintensitas rendah (di perbatasan) hingga ancaman asimetris/hybrid di dalam negeri. Kesenjangan antara ancaman dan doktrin saat ini jika tidak diatasi akan mengekspos kelemahan Indonesia di tengah rivalitas global. Inilah urgensi melakukan peta ulang doktrin pertahanan menuju 2045.

Asta Cita 2045 sebagai Kerangka Pertahanan Masa Depan

Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam *Asta Cita* (delapan misi strategis) dapat dijadikan kerangka landasan dalam merumuskan doktrin pertahanan baru Indonesia. Integrasi antara tujuan pembangunan jangka panjang dan strategi pertahanan sangat krusial agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan ketahanan nasional. Berikut bagaimana elemen Asta Cita relevan terhadap doktrin pertahanan:

- a. Misi 1: Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM. Aspek ini menekankan persatuan nasional dan ketahanan ideologis. Doktrin pertahanan harus berlandaskan Pancasila sebagai *guiding principle* sehingga penggunaan kekuatan militer selalu untuk tujuan defensif mempertahankan kedaulatan dan melindungi rakyat, bukan agresi. Penguatan ideologi juga penting untuk membentengi masyarakat dari upaya *proxy war* ideologis di tengah rivalitas (misal hasutan radikal atau kampanye propaganda asing). Nasionalisme yang inklusif perlu dipupuk agar rakyat tidak mudah diadu domba oleh pengaruh eksternal. Konsep pertahanan semesta sangat bergantung pada partisipasi rakyat, maka rakyat yang tangguh ideologinya menjadi komponen cadangan yang solid.
- b. Misi 2: Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Ini jelas core dari doktrin pertahanan. Di Asta Cita, misi ini mencakup modernisasi alutsista dan kemandirian strategis di sektor-sektor kritis. Artinya, doktrin pertahanan baru harus didukung *roadmap* pembangunan kekuatan militer: pengadaan alutsista modern (dari jet tempur generasi 4.5/5, kapal frigat dan kapal selam modern, hingga sistem pertahanan udara jarak jauh) sembari mengembangkan industri pertahanan domestik (PT Pindad, PT PAL, dan lain-lain.) agar ketergantungan impor berkurang. Hal ini akan mengurangi risiko embargo seperti kasus Su-35 di atas. Selain itu, kemandirian di bidang pangan, energi, dan air yang diamanatkan berarti pertahanan tidak lagi dilihat sempit sebagai tugas TNI, tapi juga memastikan *resilience* nasional. Doktrin “pertahanan negara” perlu bersinergi dengan “ketahanan nasional”: misal melindungi cadangan energi dalam negeri, mengamankan jalur pasok pangan, mencegah monopoli asing atas sumber air strategis. Dengan demikian, pertahanan militer dan non-militer berjalan seiring (konsep *total defense* yang sebenarnya).
- c. Misi 5: Hilirisasi dan Industrialisasi SDA untuk Nilai Tambah Ekonomi. Ini relevan karena hilirisasi sumber daya alam (seperti nikel, bauksit, rare earth) tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga strategis. Doktrin pertahanan baru sebaiknya menyinggung pentingnya kemandirian bahan strategis: contohnya, nikel yang diolah menjadi baterai litium bisa mendukung kemandirian energi (subsistem kapal selam elektrik, drone). *Rare earth* yang diolah dalam negeri bisa memasok kebutuhan industri pertahanan (magnet untuk rudal, dan lain-lain.) tanpa tergantung Tiongkok. Jadi hilirisasi SDA adalah juga bagian dari *pertahanan ekonomi*. Sebaliknya, TNI

dapat dilibatkan mendukung program hilirisasi misal Satgas TNI membantu mengamankan proyek smelter nikel dari sabotase atau campur tangan asing. Ini simbiosis antara ekonomi dan pertahanan.

d. Misi 7: Reformasi Birokrasi, Hukum, dan Pemberantasan Korupsi. Sehebat apapun rancangan doktrin, implementasinya rentan gagal jika institusi pertahanan tidak bersih dan efektif. Reformasi birokrasi di Kemhan dan TNI perlu dilanjutkan agar pengelolaan anggaran pertahanan yang meningkat (diproyeksikan terus naik menuju 2045) digunakan optimal. Pemberantasan korupsi di pengadaan alutsista akan memastikan TNI memperoleh peralatan terbaik sesuai harga, bukan alutsista tua akibat *mark-up*. Juga, reformasi hukum diperlukan untuk mendukung langkah-langkah pertahanan non-konvensional (contoh: payung hukum *cyber defense*, aturan operasi militer selain perang di ZEE, dan lain-lain.). Intinya, doktrin pertahanan 2045 harus didukung *good governance*. Lemhannas (2025) menekankan bahwa *good governance* bagian integral ketahanan nasional, sejalan dengan Asta Cita.

e. Misi lainnya (3,4,6,8) juga secara tidak langsung berkaitan. Penciptaan lapangan kerja berkualitas (Misi 3) dan pengembangan SDM (Misi 4) berarti Indonesia bisa memiliki basis ilmuwan, insinyur, dan prajurit profesional untuk mengembangkan teknologi pertahanan sendiri. Pembangunan dari desa (Misi 6) membantu pemerataan sehingga kerawanan sosial (yang bisa jadi pintu masuk *proxy war*) berkurang. Harmoni lingkungan dan toleransi (Misi 8) memastikan konflik horizontal minim, sehingga fokus pertahanan bisa *outward-looking*.

Dengan kerangka Asta Cita ini, doktrin pertahanan baru Indonesia tidak hanya fokus pada kesiapan militer, tapi juga menyatu dengan cita-cita Indonesia Emas 2045: berdaulat, maju, dan berkarakter Indonesia. Doktrin pertahanan dapat diberi spirit “Pertahanan Indonesia Emas” mencerminkan negara kuat secara militer sekaligus makmur dan demokratis. Prinsip bebas-aktif dan nilai Pancasila tetap menjadi landasan moral, mencegah Indonesia terjerumus menjadi agresor atau *proxy* bagi negara lain.

Rekomendasi Peta Ulang Doktrin: Doktrin “Pertahanan Indo-Pasifik 2045”

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengusulkan garis besar doktrin pertahanan Indonesia yang telah dipetakan ulang untuk menjawab tantangan geopolitik Indo-Pasifik menuju 2045. Doktrin ini untuk sementara dinamai “Doktrin Tri Sakti Nusantara 2045” (sebagai ilustrasi konsep tiga kekuatan: darat, laut, udara ditambah unsur siber/ruang, yang berakar pada kepentingan Nusantara). Adapun ciri pokok doktrin baru ini:

a. Proaktif Regional : *Active Defense with Regional Outreach*: Tidak lagi semata defensif pasif, Indonesia harus proaktif menjaga stabilitas regional. Doktrin menekankan *engagement* aktif TNI dalam kerja sama keamanan kawasan Indo-Pasifik, misalnya melalui pelibatan dalam misi perdamaian PBB di wilayah Asia Pasifik, latihan gabungan rutin (Garuda Shield ditingkatkan skalanya mencakup lebih banyak negara), dan inisiatif mediasi konflik kawasan. TNI diproyeksikan menjadi kekuatan “*regional peacekeeper*” yang disegani, selaras dengan kebijakan luar negeri yang memajukan *ASEAN centrality*. Dengan proaktif, Indonesia dapat membentuk norma (misal *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan) ketimbang hanya bereaksi. Namun, keaktifan ini tetap dalam koridor bebas-aktif: memimpin tanpa berpihak.

b. *Deterrence by Denial* : Kedaulatan Harga Mati: Doktrin baru menjadikan *deterrence* sebagai pilar utama. *Deterrence by denial* berarti membangun kemampuan pertahanan yang membuat musuh ragu mencapai tujuannya bila menyerang Indonesia. Implementasinya antara

lain: memperkuat pertahanan berlapis di wilayah perbatasan dan pulau terluar (radar maritim dan udara yang menutup *blind spot*, rudal anti-access area denial/A2AD di Natuna dan perbatasan utara, jet tempur siaga di Natuna/Pontianak, kapal fregat stanby di choke points). Dengan ini, pihak lawan (baik negara maupun aktor non-negara) akan menghadapi kesulitan dan risiko tinggi jika melanggar wilayah Indonesia. Konsep deterrence defensif aktif juga diadopsi misal, saat terdapat kapal asing masuk ZEE, doktrin mengizinkan TNI AL bertindak tegas secara bertingkat (peringatan, blockade, hingga penindakan hukum) tanpa harus menunggu eskalasi membesar. Selain itu, *Show of Force* (unjuk kekuatan) sesekali dilakukan terukur, contohnya Latihan Gabungan TNI di Natuna atau Laut Sulawesi untuk menunjukkan kemampuan. Tujuannya bukan provokasi, tapi memastikan lawan berpikir dua kali sebelum bertindak melanggar kedaulatan RI.

c. Komprehensif dan Terintegrasi : *Whole of Nation Defense*: Doktrin mempertahankan esensi Pertahanan Rakyat Semesta namun diperbarui konteksnya. *Whole-of-nation defense* berarti melibatkan semua komponen bangsa secara terintegrasi menghadapi ancaman multidimensi. TNI, Polri, Bakamla, BIN, BSSN (Badan Siber), hingga komponen pendukung seperti komunitas sains/teknologi dan dunia usaha, semua diorkestrasi di bawah strategi pertahanan nasional terpadu. Misalnya, dalam menghadapi serangan siber masif, BSSN memimpin dengan dukungan unit siber TNI; atau saat krisis energi, diplomasi didukung proteksi militer di objek vital (kilang, anjungan lepas pantai). Struktur komando TNI perlu penyesuaian: pembentukan Komando Gabungan Wilayah (Kogabwilhan) sudah langkah maju, tinggal dioptimalkan untuk memungkinkan respon cepat lintas-matra. Doktrin baru juga menyebut peran *civil reserve component* (Komponen Cadangan) yang mulai dibentuk pasca UU PSDN 2019 misalnya tenaga IT cadangan untuk membantu saat *cyber defense*, atau komunitas maritim (nelayan) sebagai mata dan telinga TNI AL di lapangan. Semua diramu dalam konsep pertahanan *hybrid* yang luwes menghadapi situasi damai maupun krisis.

d. Fleksibel dan Adaptif – *Gradual Response & Escalation Control*: Belajar dari konsep *Flexible Response* NATO era Perang Dingin, Indonesia perlu doktrin dengan skema tanggap ancaman berjenjang. Artinya, doktrin mengatur respons proporsional mulai dari *soft power* hingga *hard power* sesuai tingkat ancaman. Contoh, menghadapi kapal riset asing ilegal: tahap awal cukup dengan protes diplomatik dan penegakan hukum oleh Bakamla; jika berlanjut, naik ke pengusiran oleh kapal TNI AL; jika situasi memburuk (kapal asing bersenjata), TNI AL berhak mengerahkan kapal kombatan dan dukungan udara. Semua tingkatan ini diatur jelas untuk menghindari respon under atau over. Adaptif juga berarti doktrin dievaluasi berkala (misal tiap 5 tahun) menyesuaikan perkembangan teknologi dan geopolitik. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi bersikap *ad hoc* tetapi memiliki panduan menghadapi berbagai skenario (kontinjensi konflik di LCS, bencana besar, pandemi biologis, dan lain-lain.).

e. Kemandirian dan Kolaborasi Teknologi: Doktrin memasukkan visi kemandirian alutsista yang sudah dicanangkan pemerintah. Ditekankan bahwa *self reliant defense industry* adalah bagian dari strategi jangka panjang: target 2045 Indonesia bisa memproduksi minimal 50% kebutuhan alutsista utama sendiri (kapal perang medium, pesawat angkut, IFV, peluru kendali tertentu, dan lain-lain.). Untuk teknologi yang belum mampu, strategi kolaborasi diterapkan dengan negara mitra tanpa terikat blok. Misal, *joint-development* kapal selam diesel listrik dengan Korea Selatan (melanjutkan proyek Nagapasa class), kerjasama produksi drone tempur dengan Turki, dsb. Doktrin memastikan diversifikasi suplai senjata agar tidak mudah dipolitisasi

oleh rivalitas global. Ini berbeda dari doktrin lama yang tak eksplisit soal pengadaan. Di doktrin baru, penguasaan teknologi dijadikan salah satu indikator kekuatan pertahanan. Demikian pula, pengembangan *cyber-defense* lokal dan *space capability* (misal satelit militer dan roket kecil) didorong. Semua ini memerlukan investasi SDM dan R&D, sejalan misi pembangunan SDM Asta Cita.

Doktrin “Tri Sakti Nusantara 2045” di atas menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, modern, namun tetap berkarakter Indonesia. Dalam beberapa hal, ia berbeda dari doktrin sebelumnya: lebih menekankan aspek maritim dan multi-domain, membuka diri pada kerjasama tak mengikat, dan mengedepankan deterrence aktif. Meski begitu, kesinambungan dijaga dengan prinsip pertahanan semesta dan moral Pancasila. Doktrin ini dapat dituangkan ke dalam Buku Putih Pertahanan edisi baru atau bahkan peraturan perundangan, sehingga menjadi pegangan resmi TNI dan pemangku kepentingan. Tentunya, implementasi doktrin perlu didukung pendanaan yang konsisten (minimal 1,5-2% PDB untuk pertahanan seperti rekomendasi berbagai studi) dan kemauan politik yang kuat. Namun, dengan doktrin yang jelas, Indonesia dapat memproyeksikan posisi strategis yang tegas: berdiri di atas kaki sendiri di tengah rivalitas, siap berkolaborasi untuk perdamaian, namun juga siap melawan setiap ancaman terhadap kedaulatan.

Kesimpulan

Indo-Pasifik di abad ke-21 telah menjadi panggung utama persaingan kepemimpinan global dan kompetisi sumber daya. Pertarungan pengaruh antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia di kawasan ini berlangsung di berbagai bidang dari perebutan ladang minyak dan mineral, dominasi teknologi, hingga adu kuat militer di laut dan ruang angkasa. Dampaknya sangat dirasakan negara-negara kawasan, tak terkecuali Indonesia. Analisis di atas menunjukkan bahwa rivalitas sumber daya para kekuatan besar tersebut telah dan akan terus memengaruhi arsitektur keamanan Indo-Pasifik: meningkatkan potensi konflik di Laut Cina Selatan, mendorong militerisasi jalur laut strategis, mengganggu rantai pasok ekonomi, serta menguji solidaritas regional. Bagi Indonesia, tantangan yang muncul bersifat dua muka: di satu sisi muncul ancaman nyata terhadap kedaulatan (contoh: intrusi di Natuna, serangan siber), di sisi lain ada peluang strategis (kesempatan memetik manfaat ekonomi dan teknologi dari kedua kubu).

Indonesia tidak bisa merespons dinamika ini dengan *business as usual*. Sikap netral pasif justru berisiko membuat Indonesia menjadi korban atau pion dalam pertarungan pihak lain. Sebaliknya, Indonesia perlu menerapkan netral-aktif, yaitu berpegang pada independensi politik luar negeri namun secara aktif membentuk lingkungan strategis yang kondusif bagi kepentingannya. Hal ini membutuhkan penyesuaian fundamental dalam strategi dan kebijakan pertahanan. Doktrin pertahanan nasional harus dipetakan ulang agar selaras dengan realitas era kompetisi sumber daya. Doktrin baru harus mampu menjawab ancaman non-tradisional, memperkuat keunggulan maritim negara kepulauan, dan luwes membangun kemitraan. Semua itu tentu harus tetap berlandaskan prinsip dasar konstitusi dan ideologi Indonesia, sehingga tidak meninggalkan jatidiri bangsa.

Sebagai panduan, Visi Asta Cita 2045 menawarkan kerangka integratif antara pembangunan nasional dan penguatan pertahanan. Doktrin pertahanan berbasis Asta Cita akan memastikan bahwa keamanan nasional bukan domain terpisah, melainkan terpadu dalam visi Indonesia Emas 2045: bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya (mengutip Trisakti Bung Karno). Implementasi doktrin pertahanan baru yang adaptif ini akan membantu Indonesia berdiri tegak di tengah rivalitas Indo-Pasifik mampu menjaga kedaulatan dan sumber daya alamnya sendiri, sambil berkontribusi aktif pada stabilitas dan perdamaian kawasan sesuai amanat konstitusi.

Dengan demikian, pada tahun 2045, ketika Indonesia genap berusia 100 tahun merdeka, kita tak hanya mencapai status negara maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki pertahanan yang kuat dan disegani, berkarakter Indonesia. Inilah warisan bagi generasi mendatang: Indonesia yang mampu menghadapi dinamika global apapun tanpa kehilangan jati diri dan kepentingan nasionalnya.

Daftar Pustaka

- White House. (2022). *Indo-Pacific Strategy of the United States*. (Strategi resmi pemerintah AS yang menekankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kerja sama dengan sekutu, serta upaya mengamankan rantai pasok dan deterensi terintegrasi) [bidenwhitehouse.archives.gov](https://www.bidenwhitehouse.archives.gov)
- Kementerian Pertahanan RI. (2022). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (Dokumen kebijakan pertahanan Indonesia yang mengidentifikasi ancaman aktual dan rencana pembangunan kekuatan pertahanan, termasuk penekanan pada ancaman non-militer dan perlunya modernisasi alutsista).
- ASEAN. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. Jakarta: Sekretariat ASEAN. (Kerangka pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik yang menekankan prinsip inklusivitas, sentralitas ASEAN, kerja sama maritim, dan pembangunan berkelanjutan di tengah rivalitas kekuatan besar).
- Lemhannas RI. (2025). *Analisis Asta Cita dalam Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional. (Laporan yang membahas integrasi delapan misi Asta Cita 2045 dengan aspek ketahanan nasional Indonesia, menyoroti pentingnya reformasi pertahanan, kemandirian strategis, dan good governance sebagai prasyarat Indonesia Emas 2045) pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id.
- Stashwick, S. (2018). "China's Security Gambit in the Indian Ocean." *The Diplomat*, May 11, 2018. (Artikel yang menjelaskan kepentingan Tiongkok di Samudra Hindia, kaitannya dengan impor energi melalui Selat Malaka, proyek OBOR di Sri Lanka dan Pakistan, serta respons negara lain terhadap ekspansi maritim Tiongkok) thediplomat.com
- Aquilino, J.C. (2022). Pernyataan dalam *Associated Press* via The Guardian, 20 Maret 2022. (Berita tentang pernyataan Admiral Aquilino, Panglima Indo-Pacom AS, yang mengungkap militerisasi pulau oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan dan implikasinya terhadap keamanan regional) theguardian.com.
- Yuniar, R.W. (2024). "Indonesia drove Chinese ship out of disputed waters. Is Beijing testing Jakarta's resolve?" *South China Morning Post*, 24 Oct 2024. (Laporan insiden kapal Coast Guard Tiongkok di Natuna yang mengganggu survei migas Indonesia dan tindakan tegas Bakamla mengusirnya) scmp.com
- Yeo, M. (2021). "Indonesia gives up on Russian aircraft purchase, instead turning to US and French options." *Defense News*, Dec 22, 2021. (Artikel berita mengenai keputusan Indonesia membatalkan pembelian Sukhoi Su-35 karena khawatir sanksi AS/CAATSA, beralih ke jet tempur Barat) defensenews.com.
- U.S. Energy Information Administration (EIA). (2013). *Today in Energy – South China Sea resources*. (Analisis EIA tentang estimasi cadangan minyak dan gas di Laut Cina Selatan, menunjukkan total ~11 miliar barel oil & 190 TCF gas, dengan cadangan terbukti mayoritas di luar area sengketa) eia.gov.
- Pendidikan-Sains Unesa. (2025). "Asta Cita: Delapan Misi Menuju Indonesia Emas 2045." pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id. (Uraian delapan misi Asta Cita pemerintahan Indonesia menuju 2045, termasuk misi pertahanan dan keamanan nasional yang menekankan modernisasi alutsista dan kemandirian pangan-energi-air untuk ketahanan nasional) pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id.